

0416312

VOLUME VI, NO. 1, JUNI 2012

ISSN : 1978 - 0982

VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM



Efektivitas Penegakan Pidana Kerusakan Pura
(Oleh: Hujan Suparba)

Perkawinan Sebagai Bentuk Bhakti Sadagraha
Untuk Mengselamatkan Leluhurnya Dari
Kesengsaraan
(Oleh: Hujan Rudi)

Kendaraan Hukum Masyarakat Sebagai
Pengguna Jalan di Kota Denpasar
(Oleh: Dewa Pute Teguh)

Pembudayaan Umat Pesongor di Desa
Pakraman Sebagai Upaya Meminimalisir
Konflik
(Oleh: A. Purwanan)

Mediasi Salah Satu Cara Menyelesaikan
Konflik Antar di Bali
(Oleh: I Nyoman Aji Purwanan)

Etika Profesi Hakim di
Alam Perspektif Hukum Hindu
(Mawana Dharma Sastra)
(Oleh: I Gede Jansawijaya)

Undang-Undang No. LPNPS/1965 dan
Klasifikasi Agama Hindu di Jawa
(Oleh: Agilerni)

Sistem Hukum Hindu Menaja Arab Hukum
Yang Sistematis Perspektif Hukum Hindu
Pasmit, Ditinjau dengan Dasar-Dasar
Nilai Normatif Pada Anak Kasta Raja Dalam
Kitab Manawa Dharmasasthra
(Oleh: I Made Nugroho)

Menggugat Awig-Awig, Meningkatkan
Keterlibatan Krama Desa Pakraman Dalam
Pariwisata
(Oleh: Asep Sawadi)

Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Hukum	Volume VI	Nomor 1	Hal 1 - 100 + IV	Desember Juni 2012	ISSN 1978 - 0982
--	-----------	---------	------------------	-----------------------	---------------------

PENERBIT
FAKULTAS DHARMA DUTA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

III.A.1.6.3).12

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM

VYAVAHARA DUTA

Volume VI, No. 1, Juni 2012

**JURUSAN HUKUM AGAMA
FAKULTAS DHARMA DUTA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI
DENPASAR**

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	iv
EFEKTIVITAS PENEGAKAN <i>BHISAMA</i> KESUCIAN PURA Oleh Wayan Supartha,	1-12
PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK BHAKTI SUPUTRA UNTUK MENYELAMATAKAN LELUHURNYA DARI KESENGSARAAN Oleh Drs. I Wayan Redi, M. Ag.,	13-20
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI PENGGUNA JALAN DI KOTA DENPASAR Oleh Dewa Putu Tagel,	21-31
PEMBERDAYAAN UNSUR <i>PAWONGAN</i> DI <i>DESA PAKRAMAN</i> SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KONFLIK Oleh N. Putrawan',	32-44
MEDIASI SALAH SATU CARA MENYELESAIKAN KONFLIK ADAT DI BALI Oleh I Nyoman Alit Putrawan,	45-56
ETIKA PROFESI HAKIM D ALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU (MANAWA DHARMASASTRA) Oleh I Gede Januariawan,	57-69
UNDANG-UNDANG NO: 1/PNPS/1965 DAN EKSISTENSI AGAMA HINDU DI JAWA Oleh Sugiarti,	70-77
SISTEM HUKUM HINDU MENUJU ARAH HUKUM YANG SISTEMATIS: Persepektif Hukum Hindu Positif, Dihubungkan Dengan Dasar-Dasar Nilai Normatif Pada Anak <i>Ksetraja</i> Dalam Kitab Manawadharmasastra Oleh I Made Sugata,	78-90
MENGGUGAT <i>AWIG-AWIG</i>, MENINGKATKAN KETERLIBATAN <i>KRAMA DESA PAKRAMAN</i> DALAM PARIWISATA Oleh Ketut Sumadi,	91-100

MENGGUGAT AWIG-AWIG,(Ketut Sumad, 91-100)

MENGGUGAT AWIG-AWIG, MENINGKATKAN KETERLIBATAN KRAMADESA PAKRAMAN DALAM PARIWISATA

Oleh : Ketut Sumadi

Dosen Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar

E-mail: spiritbali62@yahoo.com

ABSTRACT

Hinduism and Balinese village instistusi critical power loss due to construction being part of the superstructure of society, he autonomous rationality and indulge in the interests of power, the source of justification of action. Marx called religion the ruler used to anesthetize the public (to opiates) so that people become unconscious, the structural reality was shackled, constrained, alienate and exploit him. This is evident from the presence of weak-Awig Awig Village in Bali is supposed to maintain the viability and improve the welfare of Hindus as the villagers, in fact they are even more marginalized in the development of tourism. Therefore, the existence of these necessary awig awig sued or revised return to enhance the participation of the villagers in tourism. This is in line with the content of Regulation 3 of 1991, on Cultural Tourism and the RI of Tourism Act No.10 of 2009.

Keywords: Awig-Awig, villagers, tourism, welfare.

I. PENDAHULUAN

Bali selalu mendapat pujian dari berbagai organisasi kepariwisataan dunia yang suka membuat polling tentang kesan wisatawan ketika berkunjung ke suatu destinasi pariwisata di dunia. Bali selalu menduduki peringkat teratas sebagai destinasi pariwisata budaya yang nyaman, aman, dan pavorit bagi wisatawan karena keseriusan orang Bali melestarikan sekaligus mempertontonkan aktivitas budayanya kepada wisatawan. Dengan kekaguman wisatawan ini, berarti Bali tetap memegang *record* citra sebagai "Pulau Budaya" dan mensejajarkan citranya dengan destinasi pariwisata Kepulauan Hawaii yang peringkat teratas dalam keindahan alam dan atraksi wisata natural.

Dengan fenomena di atas, sampai saat ini praktik-praktik budaya Bali menjadi daya tarik paling dominan yang mendorong wisatawan berkunjung ke Bali (News Letter: 2002; Prameswari 2005; Ardika, 2007: 74). Tidak berlebihan bila, Pemerintah Daerah Bali menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 1974, kemudian diperbaharui menjadi

Perda No.3 Tahun 1991, tentang Pariwisata Budaya untuk mengembangkan suatu model kepariwisataan di Bali yang bertumpu pada keunikan kebudayaan. Modal budaya berupa praktik-praktik budaya dalam kehidupan sehari-hari, tradisi keagamaan, kesenian, atau matapencaharian penduduk, dijadikan dasar dalam pengembangan pariwisata Bali. Dalam Undang-Undang Kepariwisata RI No.10 tahun 2009 ditegaskan sebagai berikut; Pasal 5 ; Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip; (a) Menjunjung tinggi agama dan nilai budaya sebagai penjawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.; (b)Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya,dan kearifan; (c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Sedangkan Pasal 6; Pembangunan keparwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui

pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dengan memperhatikan pengesahan Undang-Undang kepariwisataan tersebut, maka dalam sisi religiositasnya, agama Hindu yang hidup menjwai tradisi dalam desa pakraman di Bali, ibarat obor yang memberi "penerang" arah bagi masyarakat dalam memantapkan jalan spiritualnya, sehingga hidup di dunia terasa damai dan penuh makna kesejahteraan lahir bathin. Namun dalam sisi pragmatismenya, agama kerap kali dikonstruksi oleh para penguasa atau politisi yang berkuasa atau yang tengah merebut kekuasaan dan para pengusaha yang melebarkan sayap perusahaan sehingga memuluskan langkah mereka untuk meraih apa yang dicita-citakan. Agama dan kebudayaan dalam hal ini, sering diwacanakan akan berfungsi menopang, menyediakan jalan, motivasi dan bahkan juga transendensi ke arah demokratisasi. Tetapi dalam praktiknya kerap kali bercorak "top down" (Maliki, 2001).

Sejalan dengan pendapat Ackermann (1991), Maliki menyatakan agama dan institusi *desa pakraman* di Bali kehilangan daya kritis karena dikonstruksi menjadi bagian dari superstruktur masyarakat, ia otonom dengan memperturutkan rasionalitas dan kepentingan kekuasaan, sumber pembenar tindakan. Marx menyebut para penguasa menggunakan agama untuk membius masyarakat (*to opiate*) sehingga masyarakat tidak sadarkan diri (*unconscious*), bahwa kenyataan struktural telah membelenggu, mengendala, mengalienasi dan mengeksploitasi dirinya. Ini terlihat dari lemahnya keberadaan *Awig-Awig Desa Pakraman* di Bali yang semestinya dapat menjaga keberlanjutan serta meningkatkan kesejahteraan umat Hindu sebagai krama desa, kenyataannya mereka malah semakin terpinggirkan dalam perkembangan pariwisata. Karena itu, eksistensi awig-awig ini perlu digugat atau direvisi kembali untuk meningkatkan peranserta *krama desa* dalam pariwisata.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang *desa pakraman* dan kebudayaan Bali dalam hegemoni kekuasaan politik di Indonesia yang dikartikan dengan pengembangan pariwisata, dimana hegemoni negara terhadap masyarakat sangat kuat. Dalam perspektif politik pengembangan pariwisata, negara telah menentukannya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), kemudian masing-masing pemerintah provinsi menjabarkan dalam peraturan daerah (Perda). Di Bali misalnya, terbit Perda No. 3 tahun 1974, diperbaharui menjadi Perda No. 3 tahun 1991, tentang Pariwisata Budaya. Dalam implementasinya, agama dan kebudayaan dijadikan instrumen hegemoni dan dominasi atas masyarakat, sehingga kontrol sosial di dalam praktek agama menjadi sangat lemah karena batas-batas legitimasi simbolik mengabur, terjadi "deteritorialisasi", suatu proses menghilangnya batas-batas kebudayaan.

Dari pembahasan tulisan ini diharapkan dapat menemukan benang merah untuk mengendalikan hegemoni dan dominasi kekuasaan politik pengembangan pariwisata yang berorientasi pasar, sehingga agama dan kebudayaan tidak kehilangan makna serta tetap menjadi referensi nilai dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, pemahaman ini akan bermuara pada terbangunnya harmonisasi antara *state, society, dan market*.

II. PEMBAHASAN

2.1. *Desa Pakraman* dan Kekuasaan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, istilah "desa adat" telah berubah menjadi "*desa pakraman*". Istilah desa adat dipopulerkan sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda di Bali untuk membedakannya dengan desa dinas yang dibentuk oleh Belanda. Sebelum penjajah Belanda datang, di Bali dikenal istilah *sima, drsta, lekita, paswara, awig-awig* dan *krama* (Purwita, 1984:5, Dharmayuda, 2001: 1-3). *Sima* pada mulanya berarti patok atau batas suatu wilayah, kemudian berubah menjadi ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat. *Drsta* berarti pandangan,

yakni pandangan masyarakat terhadap suatu tata krama pergaulan hidup. *Lektu* berarti catatan-catatan atau peringatan mengenai suatu kejadian di masyarakat. *Paswara* berarti suatu keputusan raja mengenai suatu masalah di masyarakat. *Awig-awig* berarti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang *ajeg*. *Krama* berarti kumpulan orang-orang tua (orang yang sudah berumah tangga), kemudian berubah menjadi masyarakat. Istilah-istilah itu masih berlaku dalam masyarakat Bali saat ini.

Definisi tentang desa adat dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Bali No.06 Tahun 1986. Desa adat sebagai *desa adata* adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* (tiga tempat suci yaitu *Pura Desa*, *Pura Puseh*, dan *Pura Dalem*) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Banjar adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa adat serta merupakan suatu ikatan tradisi yang sangat kuat dalam satu kesatuan wilayah tertentu, dengan seorang atau lebih pimpinan, yang dapat bertindak ke dalam maupun keluar dalam rangka kepentingan warganya dan memiliki kekayaan baik berupa material maupun imaterial. Selanjutnya juga dijelaskan tentang wilayah *desa adat* yang disebut "*palemahan*", yakni wilayah yang dimiliki oleh desa adat yang terdiri dari satu atau lebih palemahan banjar yang tidak dapat dipisahkan dan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Palemahan desa adat (Sirtha, 2001: 58) meliputi tanah-tanah sebagai tempat tinggal, sawah, ladang, hutan dan pantai dengan batas-batas yang jelas sebagai sumber kehidupan. Wilayah itu dijaga kesuciannya dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup warga banjar. Untuk menjaga kesucian dan kelestarian tanah di wilayah desa adat, setiap tahun dilaksanakan upacara penyucian

oleh seluruh desa adat di Bali yang disebut *lawar kosanga*, sehari sebelum *nyept*. Upacara penyucian wilayah desa adat dapat pula dilakukan secara insidental, apabila terjadi peristiwa yang mengganggu ketentraman masyarakat atau peristiwa kebakaran, peristiwa perkelahian yang merenggut korban jiwa.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, berarti desa adat diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Hukum adat ini dikenal dengan istilah "*Awig-Awig*" yaitu pedoman dasar dari desa adat dalam pemerintahannya. Di samping ikatan *Awig-Awig*, desa adat juga diikat oleh tradisi dan tata krama. Tradisi adalah kebiasaan luhur dari leluhur yang diwariskan secara turun temurun, sedangkan tata krama adalah etika pergaulan yang merupakan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi dan norma itu berasal dari budaya yang dijiwai oleh agama Hindu (Dhamayuda, 2001:18).

Dalam konteks kekuasaan, keberadaan *desa pakraman* di Bali tidak bias dilepaskan dan kekuasaan tetap menarik dibicarakan, karena seluruh aspek kehidupan *krama desa* dipengaruhi oleh kekuasaan. Ada bermacam jenis kekuasaan, seperti kekuasaan ekonomi, militer, politik, atau agama. Kekuasaan politik tampak sangat menonjol, mengingat politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial (*social power*). Sosiolog Gianfranco Poggi yang sejalan dengan pemikiran Max Weber, seperti dikutip Tilaar (2003:72), membedakan kekuasaan sosial menjadi tiga jenis, yaitu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan normatif atau ideologis. Jadi, dengan pengertian yang luas, kekuasaan merupakan kemampuan manusia yang kritis untuk berbuat sesuatu yang lain dari yang lain dalam hubungannya dengan alam lingkungannya. Dengan kemampuan yang dimiliki itu, Poggi menyebut manusia sebagai *homo potens*.

Sementara Antonio Gramsci (1891 – 1937), seorang Marxis dari Italia terkenal dengan pemikirannya tentang kekuasaan dengan mempertanyakan mengapa dan bagaimana negara modern bisa mendapatkan konsensus atas kekuasaannya terhadap masyarakat. Tilaar (2003:

73) menguraikan, pemikiran Gramsci dipengaruhi oleh teori-teori sosial Sorel dan Benedetto Croce, di mana sistem kekuasaan yang didasarkan atas konsensus yang dilaksanakan oleh negara disebut hegemoni. Berbeda dengan pandangan Marxis ortodok, pandangan hegemoni tidak selamanya merupakan suatu revolusi kelas seperti yang dikemukakan oleh ajaran Marxisme ortodok. Hegemoni menggabungkan kekuatan dan kesepakatan tergantung pada suatu situasi suatu masyarakat, sehingga melahirkan warga masyarakat yang melalui pendisiplinan diri dia menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diletakkan oleh negara. Masyarakat tampaknya begitu pasrah, karena mereka melihat ini sebagai jalan terbaik untuk dapat hidup aman di tengah praktek-praktek kehidupan yang telah terstruktur. Kehidupan telah dikuasai oleh kekuasaan negara atau kekuasaan publik yang telah merembes ke wilayah privat. Menurut Gramsci, apa yang dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan kepada organisasi-organisasi sosial yang tergantung kepada konsepsi mereka mengenai dunia yang nyata dan pengorganisir praktek tersebut adalah kaum intelektual.

Gramsci membedakan ada dua jenis intelektual dari tatanan masyarakat kapitalis, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual organik terbagi atas dua kelompok, yaitu intelektual hegemonik dan intelektual kontrahegemonik. Tugas kaum intelektual hegemonik adalah memastikan bahwa pandangan dunia yang sesuai dengan kapitalisme telah diterima oleh semua kelas. Sedangkan di lain pihak, yang kontrahegemonik bertugas memisahkan kaum proletar dari pandangan-pandangan tadi serta mengukuhkan pandangan dunia sosial. Intelektual hegemonik jelas menghasilkan kompromi dengan kaum intelektual tradisional. Fenomena kompromi atau rekonsiliasi ini sangat menarik perhatian Gramsci, serta jika ada anggota masyarakat tidak mau berkompromi maka akan ada represi terhadap kelompok tersebut oleh negara. Dengan jalan disiplin yang ditanamkan lewat lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga agama, dan organisasi sosial kemasyarakatan sehingga disiplin itu bisa

dilaksanakan. Karena itulah Gramsci menegaskan, bahwa hegemoni adalah hubungan edukasional (*educational relationship*). Hubungan edukasional inilah yang membentuk *civil society* yang di dalamnya terletak kekuasaan.

Dua prinsip Gramsci yang sangat berpengaruh, seperti dijelaskan Tilaar, adalah perang posisi dan demokratisasi kehidupan sosial. Dalam perang posisi, dapat dilihat bagaimana pentingnya meningkatkan kemampuan dari para anggota dalam kehidupan masyarakat. Dengan peningkatan kemampuan para anggota, maka mereka dapat menentukan tempatnya atau mengubah struktur kehidupan kelas dalam masyarakat menurut pandangan sosialisme Gramsci. Sedangkan dalam proses demokratisasi, hubungan-hubungan dalam masyarakat akan menjadi lebih baik, sehingga dengan pendidikan hubungan-hubungan yang lebih luas dari seseorang akan memungkinkan terciptanya kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan rakyat merupakan syarat bagi perubahan kehidupan rakyat pada umumnya. Karena itu, pendidikan dan pengembangan kebudayaan dapat merupakan langkah-langkah bagi perlawanan suatu hegemoni.

Untuk bisa merebut posisi sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan atau pengetahuan *krama desa pakraman*. Pendapat Foucault tentang pengetahuan dan kekuasaan memang sangat relevan dalam hal perebutan posisi ini. Kekuasaan menciptakan pengetahuan dan pengetahuan serta kekuasaan saling mempengaruhi secara langsung satu dengan yang lain. Pengetahuan *krama desa* salah satunya bias terwujud dalam *Awig-Awig Desa Pakraman* yang dapat memproteksi dirinya dalam perkembangan pariwisata di Bali.

2.2. Melemahnya Eksistensi Desa Pakraman di Bali

Strategi pembangunan kehidupan keberagaman, menurut Abdullah, telah terjadi kesalahan fatal di kalangan penguasa, akibat kesalahan pemahaman dan salah tata perbedaan agama ketika terjadi peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru. Untuk membendung paham komunisme, negara telah memaksakan

kehendaknya dengan mendorong setiap warga negaranya untuk memilih salah satu dari lima agama yang diakui di Indonesia. Dalam jangka waktu 30 tahun, proses tersebut telah membendung dan membunuh berbagai agama lokal yang potensial berkembang. Ketakutan akan dicap komunis telah menjadi faktor penting dalam tindakan pemilihan agama dan perkembangan agama-agama suku.

Keragaman agama dan kepercayaan di berbagai tempat di Indonesia telah diingkari yang kemudian berakibat melemahnya eksistensi *desa pakraman* dalam meningkatkan peransertanya dalam perkembangan pariwisata. *Majelis Agung Desa Pakraman Bali* dan *Parisada Hindu Dharma* pun akhirnya tidak bisa berbuat banyak, bahkan sampai saat ini tidak memiliki kantor yang representatif untuk menjalankan roda organisasinya. Kemana *krama desa pakraman* mesti mengadu jika memiliki masalah adat dan agama, jika kantor pengrusnya saja tidak ada di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi? Sangat memprihatinkan para *prajuru* (pengurus) *desa pakraman* di Bali tidak mempunyai tempat khusus untuk melaksanakan tugas-tugasnya mengayomi, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan di *desa pakraman*. Kenyataan ini berbeda dengan umat dan etnis lain yang datang ke Bali terus bergerak merangsek *krama desa* dan membangun pusat-pusat pendidikan dan organisasinya di pelosok-pelosok *desa pakraman* di Bali.

Abdullah dan Kutaneegara (2005) melihat, pada saat kebijakan pengakuan atas lima agama diberlakukan, negara telah menggunakan agama untuk mengendalikan rakyatnya, sehingga rakyat menjadi terdiferensiasi dalam kelompok keagamaan dan melupakan kelompok kesukuan. Kuatnya pengaruh agama dalam hal ini bahkan telah menghancurkan berbagai jenis kebudayaan daerah. Kebudayaan Jawa, Bali misalnya, yang sangat kaya dengan berbagai aktivitas dan kebudayaan material perlahan-lahan berubah menjadi kebudayaan agama yang mengelompokkan masyarakat menjadi Jawa Islam atau Kristen, Hindu, Budha.

Pengelompokan semacam ini telah melahirkan pertikaian yang dipicu oleh berbagai

faktor. Mengutip Sumartana (2001) dan Arrani (2002), Abdullah menjelaskan, sejarah sosial berabad-abad menunjukkan bahwa struktur internal dari agama-agama tersebut (baik institusi agama, kegiatan misi, dan kepemimpinan) telah melahirkan berbagai potensi konflik. Varian-varian dalam agama masih merupakan sumber pertikaian (seperti NU – Muhammadiyah atau Kristen – Katolik). Inilah menurut Suwardi (2005: 47) disebut demokrasi semu.

Bahkan setelah reformasi bergulir tahun 1998, pertikaian varian-varian agama masih terjadi di tubuh agama Hindu, terutama di Bali, dengan munculnya Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali versi Besakih dan *Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali versi Campuhan*. Parisada versi Campuhan saat ini telah berganti nama menjadi "*Parisada Dharma Hindu Bali*" sebagaimana tertuang dalam akta notaris Parisadha, Februari 1959 (Bali Post: 29 Maret 2007: 5).

2.3. Desa Pakraman di Bali dan Pariwisata

Desa Pakraman di Bali dengan penduduk mayoritas beragama Hindu, terkenal sebagai daerah seni dan pariwisata yang tetap teguh memegang warisan tradisi serta budaya berlandaskan *trihita karana*. Sampai saat ini, umat Hindu Bali umumnya tetap mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama Hindu yang terdiri dari *tattwa*, *susila*, dan *acara* (upacara sesuai konsep *Panca Yadnya*). Dalam mengimplementasikan ajaran tersebut tidak bisa lepas dari budaya lokal atau *local genius*, yang lebih dikenal dengan konsep *desa*, *kala*, *patra* atau *desa mawacara*, dengan pola hidup *menyama braya*, *paras-paros*, *asah-asih-asuh*, *sagilik-saguluk*, *sahunglung sabayantaka*, saling membantu, dan toleran dengan semua orang tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau sosial budaya. Dengan kearifan lokal ini, warga masyarakat atau *krama* Bali bisa hidup rukun dalam ikatan sistem sosial yang disebut *desa pakraman* atau *desa adat*. Tidak mengherankan jika Bali tetap menjadi destinasi wisata pavorit bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Di balik pola hidup *menyama braya* yang berhasil menjaga ikatan sosial kemasyarakatan, dalam perspektif Teori Perubahan Sosial dari Sztompka, sejalan dengan perkembangan zaman dan pariwisata yang kini memasuki era global, banyak terjadi perubahan dalam pola kehidupan bermasyarakat di desa *pakraman*, termasuk dalam kehidupan beragama. Berbagai bentuk perubahan itu perlu mendapat perhatian dan antisipasi yang tepat dari Majelis Desa Pakraman Bali, para prajuru desa pakraman dan para pejabat pemimpin daerah, termasuk Bupati dan Gubernur sebagai orang nomor satu, pimpinan tertinggi di Bali. Ibarat obat yang bisa mengobati bagian tubuh yang digerogoti penyakit, maka seorang pemimpin mesti bisa memberikan dosis obat berupa program kerja yang tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang mulai diserang virus perubahan sosial budaya, ekonomi, politik, dan keamanan yang bisa dituangkan dalam *Awig-Awig Desa Pakraman* di seluruh *desa pakraman*.

Para pemimpin di Bali yang memiliki *innerpower* dari leluhurnya, semestinya terus bergandengan tangan “**NINDIHIN IDEP NGEWANGUN BALI**”; sebab kekuatan ini mengandung pesan dan makna yang **mendalam dan luas**;

1. **Mendalam**, karena pasangan pemimpin ini mengajak *krama desa* dan masyarakat membangun Bali, desa pakraman dengan hati tulus ikhlas, keadilan, dan kejujuran sesuai konsep *desa, kala, patra* atau *desa mawacara*, dengan pola hidup *menyama braya, paras-paros, asah-asih-asuh, sagilik-saguluk, salunglung sabayantaka*, saling membantu, dan toleran dengan semua orang tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau sosial budaya.
2. **Luas**, karena pasangan pemimpin Bali, para *prajuru desa pakraman*, melalui program kerjanya menjaga keberterahanan *desa pakraman* di Bali dengan penduduk mayoritas beragama Hindu dan sebagai daerah seni serta destinasi pariwisata yang tetap teguh memegang warisan tradisi, budaya, dan kearifan lokal berlandaskan *trihita karana*

di tengah derasnya arus globalisasi yang melanda dunia.

Dengan prinsip kuat tersebut, Bali diharapkan tidak tercerabut dari identitas budayanya serta mampu berkembang sejajar dengan daerah lain atau destinasi wisata terkenal di dunia.

2.4. Menggugat *Awig-Awig* dan Memutar “*Cakra Yadnya*” Membangun Bali

Sebagai pemimpin di daerah wisata, maka konsep *World Tourism Organization* (WTO) tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat atau “*sustainable tourism community based development*”, perlu direnungkan dan dijadikan acuan program kerja. Konsep WTO menekankan agar seluruh tahapan pengembangan pariwisata dapat memberikan masyarakat lokal keuntungan dan kesempatan merespon perubahan. Masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Mereka lebih bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan yang diwarisi secara turun temurun tentang *local resources*, baik fisik maupun budaya dalam pengembangan pariwisata.

Untuk mengajak masyarakat melangkah bersama membangun pariwisata Bali sebagai daerah seni dan budaya, pemimpin perlu terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan pengimplementasian kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur dalam menjaga keberterahanan *desa pakraman* di Bali. Konsep kearifan lokal merupakan pisau bedah yang jitu untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk “**nindihin idep ngewangun Bali**” di tengah perkembangan Bali sebagai destinasi pariwisata global.

Langkah utama yang mesti dilakukan para pemimpin di Bali saat ini, termasuk para *prajuru desa pakraman*, adalah menggugat *awig-awig desa pakraman*, kemudian merivisinya sesuai perkembangan Bali sebagai daerah pariwisata. Selanjutnya menggerakkan atau memutar “*Cakra Yadnya*” yang diwariskan oleh para leluhur orang Bali dalam menjaga keberterahanan *desa pakraman*. *Yadnya* sebagai kearifan lokal, tidak hanya

berwujud ritual *Panca Yadnya*, tetapi leluhur orang Bali telah mengaktualisasikannya lagi dalam bentuk konsep *Trihita Karana*, tiga unsur yang menyebabkan terciptanya kehidupan yang harmonis lahir bathin, moksartham jagadhita, yang meliputi *pahyangan, pawongan, palemahan*.

Kekuatan “*nindihin idep ngewangun Bali*” menjadi cambuk untuk bersungguh-sungguh ingin memutar konsep “*Cakra Yadnya*”, mengimplementasikan *Panca Yadnya* dalam perilaku sehari-hari dan program kerja berlandaskan *Trihita Karana*. Para pemimpin birokrasi di Bali perlu merangkul para *hendesa desa pakraman/ adat* bersama para pengurus desa, tokoh masyarakat, dan *krama* desa saling bahu-membahu memutar “*Cakra Yadnya*”, bersama turut peduli dengan eksistensi desa pakraman yang memiliki potensi alam, kearifan lokal, seni, dan budaya yang bisa menjamin kesejahteraan hidup. Melalui konsep “*Cakra Yadnya Nindihin idep ngewangun Bali*”, keberterimaan desa pakraman dan *krama desa* bisa bangkit bersama, memanfaatkan potensi sumber daya manusia, membangun kesejahteraan bersama dalam perkembangan pariwisata.

2.5. Langkah Strategis setelah Menggugat dan Merevisi *Awig-Awig Desa Pakraman*

Memutar *Cakra Yadnya* setelah ditetapkan dalam isi *Awig-Awig Desa Pakraman*, berarti *Majelis Desa Pakraman* dan para birokrat di Bali harus mampu merevitalisasi atau mengarahkan kehidupan *krama desa pakraman* melalui;

1. Temu wirasa atau pertemuan menghidupkan dan mengaktifkan *paiketan* (organisasi) para *pemangku* (semua *pemangku pura: panti/palbon, kahyangan desa, sarati* (tukang banten), *nokang ebat* (ahli memasak makanan khas Bali perlengkapan upacara), *seka pesantian, seka pragina* (penari), *sekaa gambel* (penabuh), *undagi* (ahli bangunan/arsitek di desa), pengurus LPD, dan pengurus koperasi desa.
2. Memberikan bantuan baik berupa dukungan moral maupun bantuan dana, Mereka-mereka tersebut di atas sebagai kerangka utama “*Cakra Yadnya*” yang menjaga

kebertahanan desa pakraman di Bali. Jika potensi dan keahlian mereka bisa dikelola serta ditingkatkan dengan bantuan ilmu manajemen modern, maka mereka akan menjadi ujung tombak meningkatkan kesejahteraan desa pakraman dan pengembangan LPD dan koperasi desa, karena roda perekonomian diputar oleh *krama* sendiri melalui upacara agama atau yadnya yang tulus ikhlas dan sehatnya LPD/ koperasi.

3. Mengajukan atau mengambil inisiatif pembentukan semua *paiketan*/organisasi seperti tersebut dalam point 1 di atas, melalui acara temu wirasa yang diorganisir oleh *hendesa pakraman* beserta pengurus
4. Memberi perhatian kepada *krama* desa yang memiliki keterampilan terbatas seperti para petani *krama subak* penggarap sawah yang kini jumlahnya semakin sedikit, agar LPD/ koperasi desa membantu penanganan pascapanen dengan membeli hasil pertanian dengan harga yang wajar sehingga bisa menjamin kesejahteraan hidup. Organisasi/ *krama subak* ini akan menjadi pemasok sarana keperluan upacara agama dengan menanam tanaman upacara dan beternak.
5. Bantuan berupa dana/uang dari Bupati dan Gubernur hendaknya disalurkan dalam bentuk tabungan di LPD/koperasi desa yang dimiliki oleh masing-masing *paiketan* seperti pada point 1 dan point 4.
6. Mendorong pengurus semua *paiketan* agar terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan para anggotanya sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman dan mengantisipasi setiap fenomena yang merongrong keberterimaan desa pakraman.
7. Perhatian khusus *paiketan pemangku*, agar lebih sering mengadakan *temu wirasa* meningkatkan pengetahuan kepemimpinan dan meningkatkan kualitas diri lahir bathin, sehingga bisa lahir menjadi *sulinggih* yang diandalkan menjadi pengayom di desa pakraman masing-masing. Dengan demikian tidak akan terjadi konflik sosial di desa pakraman yang dipicu oleh masalah *sulinggih*,

karena *pemangku* di masing-masing *pura* bisa meningkatkan kualitas dirinya menjadi seorang *sulinggih*. Para *sulinggih* yang lahir di desa *pakraman* ini mendapat *pengayoman* dari desa dan diandalkan menjadi *pengayom* serta menjadi *pelita penuntun krama* dalam mengarungi kehidupan.

8. Memberi perhatian/mendorong organisasi sekaa teruna masing-masing *banjar* agar kreatif dan tidak berhenti menuntun pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai bentuk perhatian, bisa diberikan beasiswa, sebut saja namanya "Beasiswa Saraswati", karena orang Bali memuja Dewi Saraswati sebagai penguasa ilmu pengetahuan.
9. Organisasi ibu-ibu PKK masing-masing *banjar* perlu diberi bantuan uang agar kegiatan organisasi mereka bisa berjalan. Organisasi Ibu-ibu PKK masing-masing *banjar* bisa didorong/diberi perhatian agar membangun usaha ekonomi kreatif berupa "dagang gantal" atau "warung mini" setiap ada *pujawali* di *pura-pura* sewilayah desa *pakraman*. *Krama* desa diarahkan agar berbelanja kepada ibu-ibu PKK. Hal ini sekaligus untuk membendung semakin banyaknya pedagang dari luar yang berjualan saat ada *pujawali* di *pura-pura* di wilayah desa *pakraman*. Modal mereka bisa dibantu oleh LPD/koperasi dan mereka juga menaruh modalnya di LPD/koperasi desa.

Semua program kampanye atau program kerja saat menjadi pemimpin tersebut jika terlaksana, bisa menjadi kunci keberthanan *desa pakraman*, keberthanan Bali, karena *krama* desa telah bisa menghidupi diri sendiri dengan memanfaatkan keahliannya di desa dan potensi kearifan lokal yang diwariskan oleh luhurnya idep para leluhur zaman dulu. Inilah konsep "Cakra Yadnya" model peningkatan kesejahteraan *krama* desa dan keberthanan *desa pakraman* melalui *Panca Yadnya* sesuai ajaran Agama Hindu di Bali yang diwariskan para leluhur.

"Cakra Yadnya" inilah sekarang terus diputar oleh Majelis Desa Pakraman dan para birokrat di Bali yang memang memiliki warisan *innerpower* dari leluhur sesuai konsep Trihita

Karena di tengah kuatnya pengaruh budaya global dan serbuan para pendatang dari luar daerah dalam perkembangan pariwisata

III. SIMPULAN

Agama Hindu dan *Desa Pakraman* di Bali berfungsi menopang, menyediakan jalan, motivasi dan bahkan juga transendensi ke arah demokratisasi. Tetapi dalam prakteknya kerap kali bercorak "top down", sehingga kehilangan daya kritis karena dikonstruksi menjadi bagian dari superstruktur masyarakat, ia otonom dengan memperturutkan rasionalitas dan kepentingan kekuasaan, sumber pembenar tindakan. Para penguasa menggunakan agama dan *desa pakraman* untuk membius masyarakat (*to opiate*) sehingga masyarakat tidak sadarkan diri (*unconscious*), bahwa kenyataan struktural telah membelenggu, mengendala, mengalienasi dan mengeksploitasi dirinya.

Menggugat, merevisi *Awig-Awig Desa Pakraman*, dan memutar "Cakra Yadnya" di Bali dipahami dan dipraktikkan tidak hanya sebagai agama, *awig-awig*, dan kebudayaan *generic*, yang merupakan pedoman yang diturunkan, tetapi juga bersifat diferensial, yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial dalam budaya pariwisata. Sebab ideologi pasar pariwisata mempengaruhi kultur masyarakat, khususnya menyangkut tekanan ide dan praktik pasar yang mempercepat proses komodifikasi. Kemudian muncul fenomena "deteritorialisasi", suatu proses penghilangannya batas-batas moral agama dan kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- _____, dan Kutanegara, Pande Made, 2005, "Otonomi dan Hak-Hak Budaya daerah", dalam Ki Supriyoko (Editor), *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

- Adeney, Bernard T, 2000, *Etika Sosial Lintas Budaya*, Kanisius: Yogyakarta
- Ardika, I Wayan, 2007, *Pusaka Budaya dan Pariwisata*, Pustaka Larasan: Denpasar
- , 2003, “Komponen Budaya Bali sebagai Daya Tarik Wisata”. I Wayan Ardika Penyunting. *Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global*, Denpasar, Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata Universitas Udayana.
- Agger, Ben, 2006, *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Atmaja, Nengah Bawa, 2006, “Pemulihan Krisis Kebangsaan dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kajian Budaya”, makalah pada Seminar Nasional Program Kajian Budaya Universitas Udayana, di Denpasar, 18 Nopember.
- Cappra, Fritjop, 1997, *Titik Balik Peradaban*, Terjemahan M. Thoyibi, Yogyakarta: Bentang.
- Cassirer, Ernst, 1990, *Manusia dan Kebudayaan, Sebuah Esei Tentang Manusia*, Jakarta: Gramedia
- Dharmayuda, Suasthawa I Made. 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Dherana, Tjokorda Raka. 1982. *Aspek Sosial Budaya dalam Kepariwisataaan di Bali*. Denpasar: UP. Visva Vira.
- Fay, Brian, 2002, *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*, Yogyakarta, Jendela.
- Featherstone, Mike, 2001, *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Giddens, Anthony, 2000, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Terjemahan Andry Kristiawan S dan Yustina Koen S, Jakarta: Gramedia
- < 2002. *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, Terjemahan Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, Chris Wilkes, 2006, *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terjemahan Pipit Maizier, Yogyakarta, Jalasutra
- Jenkins, Richard, 2004, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Lastra, I Made, 1997, *Peraturan Kepariwisataaan*, Denpasar: STP Nusa Dua
- Lubis, Akhyar Yusuf, 2004, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Bogor, Akademia
- Maliki, Zainuddin, 2001, *Agama Rakyat Agama Penguasa, Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Yayasan Galang
- Mariyah, Emiliana, 2006, ‘Kajian Budaya, ‘Local Genius’ dan Pemberdayaan Masyarakat’, makalah pada Seminar Nasional Program Kajian Budaya Universitas Udayana, di Denpasar, 18 Nopember.
- Mulder, Niels, 1999, *Agama, Hidup Sehari-Hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, 2005, “Identitas Kejawaen: Mengurai Benang Kusut”, artikel lengkap dalam *Kejawaen Jurnal Kebudayaan Jawa*, Vol.1, No.1, September, Yogyakarta.
- Parimarta, I Gde, 2006, “Filsafat Kebudayaan Indonesia”, naskah lengkap Materi kuliah Anfulen, Denpasar, Universitas Udayana, 22-29 Agustus.
- Picards, Michel, 2006, *Bali, Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, Jakarta: Gramedia.
- Piliang, Yasraf Amir, 2004, *Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Pitana, I Gde, 1999, *Pelangi Pariwisata Bali*, Denpasar: BP
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu.G, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI
- Poespo Wardoyo, Soerjanto, 1989, *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*, Jakarta, Gramedia.

- Ratna Kutha, 2006, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Schrieke, B., 1955, Indonesian Sociological Studies, Selected Writings of B. Schrieke dalam WF Wertheim dkk. Eds. *Selected Studies on Indonesia*. Bandung: W. van Hoeve Lid—The Hague.
- Scheffold, Reimar, 1998, "The Domestication of Culture Nation-building and Ethnic Diversity in Indonesia", dalam *Globalization, Localization and Indonesia*, Editor: Peter J.M.Nas, Leiden. Koninklijk Instituut voor Taal Land-En Volkenkunde (KITLV) Royal Institute Of Linguistics And Anthropology.
- Soedjito, 1986, *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Spillane, S.J. James, 1994, *Strategi Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sudartha, Tjok Rai dan I Wayan Surpha, 2006, *Parisada Hindu Dharma dengan Konsolidasinya*, Surabaya: Paramitha.
- Sumadi, Ketut, 2003, "Ritual Agama Hindu Sebagai Daya Tarik Pariwisata Budaya Bali (Kasus Pelaksanaan Ritual di Desa Adat Kuta)". (Tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Sumadi, Ketut, 2008, *Kepariwisata Indonesia Sebuah Pengantar*, Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia
- Suardi, F., 2005, "Paham Kekuasaan Jawa dalam Budaya Politik Orde Baru dan Reformasi", dalam Mulyana (Editor), *Demokrasi dalam Budaya Lokal*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sparringa, Daniel, 2004, "Demokrasi: Konsepsi dan Praktik Sebuah Tinjauan Sosiologi Politik tentang Perkembangan Demokrasi dan Negara-Bangsa Indonesia", artikel dalam Nasion, Vol. 1 No. 1, Juni.
- _____, 2007, "Reading of Current Indonesia (2004-2007), A Political Sociology Perspective". naskah lengkap Materi kuliah Kapita Selekta Politik Indonesia, Denpasar: Universitas Udayana.
- Swarsi, Geriya dan I Wayan Geriya, 2003, "Nilai Dasar dan Nilai Instrumental dalam Keragaman Kearifan Lokal Daerah Bali", makalah Dialog Budaya, Denpasar: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Bali.
- Tilaar, H.A.R., 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesiatra.
- _____, 2005, *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Kompas.
- Turner, Bryan S., 2006, *Agama dan Teori Sosial*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Tjatera, I Wayan, 2007, "Ekonomi dan Budaya", naskah lengkap Materi kuliah Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, Denpasar: Universitas Udayana.
- Dokumen:**
- "Bali The Best Island In The World". Majalah News Letter, Oktober - Nopember. Denpasar: BPD PHRI Bali. II: 4. 2002.
- Ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004*. Jakarta: CV Tamita Utama. 2004.
- Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu, I - XV*. Denpasar: Pemda Tingkat I Bali 1999.
- Kumpulan Peraturan di Bidang Kepariwisata*, Denpasar: Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 2006.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman*, Denpasar: Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*